

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke- V, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alting, Husen, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*, Laksbang Pressindo, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-IV, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bzn, B. Ter Haar, Terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto, 1994, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djubedi, Daud, 2015, *Hak Ulayat Laut Di Era Otonomi Daerah*, Genta Press, Yogyakarta.
- Gautama, 1990, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Sudharto P., 2009, *Manusia dan Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Handoyo, B. Hestu Cipto 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
- Hira, Kartodiharjo, Hariadi dan Jhamtani, 2006, *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Equinox Publishing, Jakarta-Singapore.

- Hutagulung, Arie Sukanti, 2005, *Tebaran Pemikira Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI), Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Center For Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Kansil, Christine S.T., 2004, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kurniawan, Luthfi J., 2012, *Perihal Negara, Hukum, dan Kebijaksanaan Publik*, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang, Jawa Timur.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mansim, Achmad Rochani dan Naftali, 2006, *Kabupaten Biak Numfor: Upaya Bangkit Dari Keterpurukan*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Nurlinda, Ida, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Putra, Muchsin dan Fadillah, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik, Analisis Atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, Avveroes Press, Malang.
- R. Soehardi, Dijk, Van, 1979, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Rachman, Patji dan Abdul, 1996, *"Hak Ulayat Masyarakat Maritim, Perubahan Sistem Tradisional Pengelolaan Sumber Daya Laut Desa Alor kecil, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur"*, PMB-LIPI, Jakarta.
- Ramandey, Frits Bernard, et.all., 2005, *Profil Otonomi Khusus Papua*, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua, Jayapura.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahyono, Ary, et.all, 2000, *"Hak Ulayat di Kawasan Timur Indonesia"*, Cetakan Pertama, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wibawa, Samodra, 1994, *Kebijakan Publik, Proses, dan Analisis*, Intermedia, Jakarta.
- Wibowo, Eddi, et.all., 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wignjodipoero, S., 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Mulia, Jakarta.

#### **Kamus :**

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

#### **Jurnal, laporan Penelitian, Tesis, dan Disertasi :**

- Ahmad Solihin dan Arif Satria, 2007, "Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat", *Laporan Penelitian*, Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Volume 01, Nomor 01, IPB.

- Ary Wahyono, Sudiyono, dan Fadjar Ibnu Thufali, 1993, “Aspek-Aspek Sosial Budaya Masyarakat Maritim Indonesia Bagian Timur”, *Laporan Penelitian*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- COREMAP II (Coastal Resources Management Project II), 2004, “Sosialisasi Mitra Pesisir Kabupaten Biak Numfor”, *Laporan*, Kabupaten Biak Numfor, Papua.
- Daud Djubedi, 2009, “Penerapan Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Halmahera Selatan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Gatot Yulianto, 2008, “Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut Di Desa-Desa Pesisir Teluk Bintuni”, *Laporan Penelitian*, Buletin Ekonomi Perikanan Volume VIII Nomor 2 Tahun 2008, IPB.
- Hery Listyawati dan Dwi Haryati, 2015, “Konflik Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah terkait Maraknya Bisnis Perhotelan di Kota Yogyakarta,” *Usulan Penelitian*, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- M.G.Ohorella, 1993, “Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan Sumbangannya Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional (UUPA) dan Undang-Undang Lainnya,” *Disertasi*, Program Pascasarjana Unhas, Ujung Pandang.
- Mailinda Eka Yuniza, 2013, “Pengaturan Pelayanan Kesehatan Di Kota Jayapura Setelah Penetapan Otonomi Luas”, *Laporan Penelitian*, Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Marthinus Kainama, Janje Ciptabudi, dan J. Sahalessy, 2002, “Eksistensi Hak Ulayat Laut Di Maluku: Suatu Studi Di Maluku Tengah”, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, “Hak Ulayat Laut Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kepulauan Kei dan Papua,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009
- Sri Wahyu Ananingsih, 2015, “Perkembangan Eksistensi Hak Ulayat Laut Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara.” *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-undangan dan aturan-aturan adat:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara 1960-104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4739

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

*United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) atau Konvensi Hukum Laut Internasional, yang telah disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3319

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Numfor 2014-2019

Peraturan Bersama Kampung Auki, Kampung Sandidori dan Kampung Bindusi (Insumarires) di Meos Auki Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengesahan Aturan Adat Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat, Pesisir dan Laut Pulau Auki

Peraturan Bersama Kampung Meos Mangguandi dan Kampung Supraima di Meos Mangguandi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengesahan Aturan Adat Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat dan Laut Pulau Meos Mangguandi

Peraturan Adat Meos Auki Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat, Pesisir, dan Laut Pulau Auki

Keputusan Rapat Musyawarah Adat Pulau Auki, Kawasan Padaido Bawah, Biak Numfor Nomor : 01/KPTS-LA PA/XI/2006 tentang Statuta Musyawarah Adat Pulau Auki, Kawasan Padaido Bawah, Biak Numfor

Keputusan Musyawarah Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Pulau Meos Mangguandi tentang Aturan Adat Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat, Pesisir dan Laut di Pulau Meos Mangguandi, Distrik Padaido, Kabupaten Biak Numfor

Keputusan Rapat Masyarakat Adat Pulau Meos Mangguandi, Distrik Padaido, Kabupaten Biak Numfor Nomor : 01/KPTS-LMA PMM/X/2006 tentang Statuta

**Internet :**

<http://Immanetwork.org/who-we-are/vision/>, diakses pada tanggal 13 Februari 2016.

**Artikel :**

Yusuf M. Maryen, *Bupati Buka Sosialisasi Program Mitra Pesisir*, Papua Post, tanggal 29 Januari 2004.